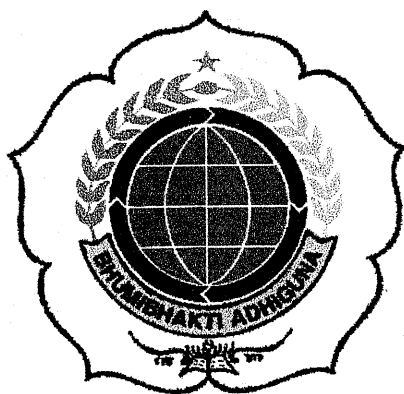


**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PELAKSANAAN PRONA DI DESA HUTUMURI
KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA KOTA
AMBON PROVINSI MALUKU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan**



Oleh :

RESA MAELISSA
NIM : 0101875/ M

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2005**

INTISARI

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kepastian hukum atas bidang-bidang tanah yang dimiliki masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan, khususnya dalam mempercepat dan meningkatkan pelaksanaan pendaftaran tanah, dikeluarkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria atau disingkat dengan PRONA. Peran serta masyarakat sangat menentukan karena sukses tidaknya program ini sangat tergantung pada partisipasi masyarakat yang terkena program ini.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PRONA dapat dilihat melalui partisipasi pada tahap pendataan administrasi pertanahan, tahap pemasangan tanda batas, tahap penetapan tanda batas, dan pada tahap pengukuran bidang tanah. Pelaksanaan PRONA di Desa Hutumuri Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon mendapat respon yang baik dari masyarakat, tetapi untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat peserta PRONA dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut perlu diadakan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey untuk maksud penjelasan (*explanatory*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi. Pengambilan sampel menggunakan cara acak sederhana atau *Simple Random Sampling*. Pada penelitian ini diambil sampel 50 orang sebagai wakil dari populasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara: analisis satu variabel (tabel frekwensi) dan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat peserta PRONA di Desa Hutumuri adalah sedang, setelah dilakukan analisis dapat diketahui bahwa variabel yang memberikan sumbangan pengaruh yang paling nyata terhadap sikap adalah pengetahuan dan pendidikan, akan tetapi secara bersama-sama pendidikan, penghasilan, luas tanah, jumlah bidang tanah, dan pengetahuan secara bersama-sama berpengaruh terhadap sikap hal ini ditunjukkan dengan harga $F = 23,289$ dengan signifikansi F sebesar 99%. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dalam penelitian ini mempunyai pengaruh sebesar 69,5%, masih terdapat faktor-faktor lain di luar faktor-faktor yang diteliti sebesar 30,5%. Variabel sikap berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan nilai $F = 51,75$ dengan signifikansi F sebesar 99%. Variabel sikap memberi pengaruh terhadap partisipasi masyarakat sebesar 50,6% masih ada faktor lain selain sikap sebesar 49,4%.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	8
A. Tinjauan Pustaka	8
B. Kerangka Pemikiran	16
C. Hipotesis.....	19
D. Batasan Operasional	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Metode Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian	22
C. Populasi	23
D. Teknik Pengambilan Sampel	23
E. Jenis dan Sumber Data	24
F. Teknik Pengumpulan Data	26
G. Cara Pengukuran.....	27
H. Teknik Analisis Data	31

BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	35
	A. Letak, Luas, dan Batas Daerah.....	35
	B. Penggunaan Tanah.	36
	C. Kependudukan	36
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
	A. Hasil Penelitian..	39
	1. Data Peserta PRONA	39
	2. Tingkat Partisipasi Masyarakat	44
	3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi	54
	B. Pembahasan.....	59
	1. Hubungan antara Pendidikan, Penghasilan, Luas Tanah, Jumlah Bidang Tanah, Pengetahuan dengan Sikap	60
	2. Pengaruh Pendidikan, Penghasilan, Luas Tanah, Jumlah Bidang Tanah, Pengetahuan Terhadap Sikap ..	62
	3. Pengaruh Sikap Terhadap Partisipasi Masyarakat	64
BAB VI	PENUTUP	66
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena sebagian besar kehidupan manusia berlangsung di atas tanah. Tanah mempunyai kedudukan yang sangat strategis, karena disamping sebagai sumber daya, juga merupakan faktor produksi yang utama baik untuk pembangunan maupun pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan, maka tak dapat dihindari seringkali muncul berbagai persoalan di dalam masyarakat terkait dengan berbagai kepentingan yang berlangsung di atas tanah. Persoalan ini umumnya disebabkan oleh kenyataan kebutuhan akan tanah cenderung meningkat sementara jumlah tanah relatif terbatas.

Sehubungan hal tersebut, maka setiap kebijakan yang berhubungan dengan bidang pertanahan harus dapat menciptakan suasana dan kondisi yang menguntungkan sehingga tanah yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang diberi wewenang untuk mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan berusaha dengan sungguh-sungguh dan secara terus-menerus untuk memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan

masyarakat. Usaha yang dilakukan salah satunya dengan peningkatan pelayanan dalam pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi setiap pemegang hak atas tanah.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi rakyat Indonesia sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Pasal 19 UUPA menetapkan pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diikuti dengan peraturan pelaksanaannya, berupa Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur penyelenggaraan pendaftaran tanah yang dilaksanakan melalui 2 cara, yaitu:

- (1). Pendaftaran tanah secara sistematik yang diselenggarakan atas prakarsa pemerintah berdasarkan suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan pada suatu wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- (2). Pendaftaran tanah secara sporadik yang dilaksanakan atas

permintaan yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atau subyek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya, baik secara individual/perseorangan maupun kelompok/massal. Namun pendaftaran tanah secara sporadik (rutin) yang dilakukan atas inisiatif dari masyarakat masih sangat rendah.

Menurut PUSLITBANG BPN (2002:9) bahwa sejak kebijakan pendaftaran tanah dilaksanakan (1961), tingkat pelayanan pensertipikatan tanah masih rendah, dimana sampai tahun 2002 dari \pm 78 juta bidang tanah yang ada, baru \pm 26 juta bidang tanah yang sudah disertipikatkan (33 %) atau sekitar 221 ribu bidang tanah yang disertipikatkan pertahun (0,85 %).

Salah satu upaya pemerintah dalam mendorong minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya dan meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan, khususnya dalam mempercepat dan meningkatkan pelaksanaan pendaftaran tanah, maka sejak tahun 1981 pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria atau disingkat dengan PRONA. Kemudian untuk lebih meningkatkan pelaksanaan PRONA, dikeluarkanlah Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-1916 Tanggal 3 Juli 1996 tentang Pelaksanaan Kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), Proyek Daerah (PRODA), dan Proyek Operasi Nasional Agraria Swadaya (PRONA Swadaya).

Selain itu pemerintah telah banyak melakukan reformasi di bidang peraturan perundangan termasuk tata cara yang lebih sederhana, dan penurunan biaya sertipikasi, dengan harapan masyarakat tidak direpotkan dengan tata cara sertipikasi yang berbelit-belit dan dengan biaya yang relatif terjangkau. Namun demikian upaya tersebut tak ada artinya tanpa didukung oleh adanya kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat merupakan subjek sekaligus objek pembangunan, yang pada akhirnya nanti pembangunan diharapkan akan dapat menciptakan suatu kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan pembangunan partisipasi dari seluruh masyarakat sangat diperlukan. Begitu pula dalam pembangunan pertanahan yang diwujudkan dalam pelaksanaan PRONA, partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan karena masyarakat berkepentingan secara langsung terhadap tanah-tanah yang dimilikinya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, menghindari sengketa, dan/atau kepentingan lainnya.

Secara administratif Desa Hutumuri termasuk wilayah Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon. Kota Ambon merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku dimana minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya relatif rendah, hal ini

ditunjukkan dengan permohonan pensertipikatan tanah secara sporadis (rutin) pada Kantor pertanahan Kota Ambon per hari kurang lebih 5 (lima) bidang. Desa Hutumuri dipilih sebagai objek PRONA karena desa ini sudah ada sarana kerja yang memadai seperti peta situasi, dan aksesibilitasnya baik sehingga memudahkan dalam komunikasi dan transportasi.

PRONA yang dilaksanakan tersebut mendapat tanggapan dan dukungan dari masyarakat, tanggapan dan dukungan tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan PRONA. Pelaksanaan kegiatan PRONA tersebut telah selesai dan mencapai target yang telah ditetapkan. Dari pelaksanaan PRONA selama ini dapat dinyatakan bahwa agar pelaksanaan PRONA dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana, sangat diperlukan adanya partisipasi masyarakat peserta PRONA itu sendiri. Akan tetapi untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan mempengaruhi masyarakat dalam mensertipikatkan tanahnya melalui pelaksanaan PRONA masih perlu diadakan penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul : **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PRONA DI DESA HUTUMURI KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA KOTA AMBON PROVINSI MALUKU"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui PRONA di Desa Hutumuri Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mensertipikatkan tanahnya melalui pelaksanaan PRONA di Desa Hutumuri Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui PRONA di Desa Hutumuri Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mensertipikatkan tanahnya, melalui pelaksanaan PRONA di Desa Hutumuri Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis di bidang pertanahan khususnya pendaftaran tanah melalui PRONA.
- b. Sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan penentuan kebijakan di bidang pertanahan.
- c. Sebagai bahan perbandingan dan acuan untuk penelitian yang sama yang dilaksanakan di daerah lain.
- d. Untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang pensertipkatan tanah khususnya mengenai PRONA.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PRONA di Desa Hutumuri Kabupaten Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku termasuk dalam kategori sedang.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sikap masyarakat dalam pensertipikatan tanah adalah pengetahuan, dengan derajat kepercayaan 99% dan mempunyai nilai koefisien sebesar 1,254.
3. Variabel luas tanah, jumlah bidang tanah, penghasilan secara statistik ternyata tidak berpengaruh secara nyata, tetapi secara bersama-sama, pendidikan, penghasilan, luas tanah, jumlah bidang tanah dan pengetahuan mempunyai pengaruh terhadap sikap. Hal ini ditunjukkan dengan harga F sebesar 23,289 dengan derajat kepercayaan 99%.
4. Secara bersama-sama pendidikan, penghasilan, luas tanah, jumlah bidang tanah memberikan sumbangan pengaruh sebesar 69,5%, hal ini ditunjukkan dari harga *Adjusted R Square* sebesar 0,695.

Masih terdapat 30,5% variabel lain di luar variabel pendidikan, penghasilan, luas tanah, jumlah bidang tanah dan pengetahuan.

5. Variabel sikap memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pensertipikatan tanah dengan nilai koefisien sebesar 0,441 dengan derajat kepercayaan 99%
6. Variabel sikap memberikan sumbangan pengaruh sebesar 50,6%, hal ini ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,506 menunjukkan bahwa faktor sikap (Y_1) berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat (Y_2) sebesar 50,6% dan masih ada faktor-faktor lain selain sikap sebesar 49,4%.

B. Saran

Faktor-faktor yang memberikan sumbangan pengaruh yang relatif besar terhadap sikap adalah pengetahuan dan pendidikan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pensertipikatan tanah diperlukan peningkatan sikap masyarakat terhadap pensertipikatan tanah. Untuk meningkatkan sikap masyarakat dalam pensertipikatan tanah diperlukan peningkatan pendidikan dan pengetahuan. Peningkatan pendidikan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar.

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pensertipikatan tanah maka sebaiknya sebelum dilaksanakannya PRONA perlu diadakan penyuluhan yang dimaksudkan untuk dapat

memberikan informasi yang diperlukan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pensertipikatan tanah melalui PRONA.

Hasil penelitian menunjukkan secara bersama-sama pendidikan, penghasilan, luas tanah, jumlah bidang tanah, dan pengetahuan memberikan sumbangan pengaruh terhadap sikap masyarakat sebesar 69,5% dan masih terdapat 30,5% variabel lain di luar variabel yang diteliti. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lanjutan agar dapat diketahui variabel apa selain variabel yang diteliti dalam penelitian ini yang berpengaruh terhadap sikap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1996). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rhineka Cipta. Jakarta.
- Fujiana, (2002). Minat Masyarakat dalam Penswertipikatan Tanah di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Skripsi Program Diploma IV, Jurusan Manajemen Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Harsono, Boedi. (1999). Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria , Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan, Jakarta.
- , (2000). Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum tanah. Djambatan, Jakarta.
- Mudjiono. (1997). Politik dan hukum Agraria. Liberty, Yogyakarta.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan. (1990). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional. (2002). Rencana Induk Penelitian PUSLITBANG BPN tahun 2002-2005, Jakarta.
- Sarjono. (2000). Partisipasi Masyarakat dalam PRONA Swadaya di Desa Binorong Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Skripsi Program Diploma IV, Jurusan Manajemen Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P. (1995). Teori Motivasi dan Aplikasinya. Rhineka Cipta, Jakarta.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. (1987). Metode Penelitian Survey. LP3ES, Jakarta.

Sudjito, (1987). PRONA, Pemsertipikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis. Liberti, Yogyakarta.

Suharno dkk. (2003). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pemsertipikatan Tanah di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. *Bhumi Edisi 3 Tahun 6*, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.

Walgito, Bimo. (1997). Pengantar Psikologi Umum. Andi Offset, Yogyakarta.

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

Surat Edaran menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-1916 Tanggal 3 Juli 1996 tentang Pelaksanaan Kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), Proyek Daerah (PRODA), dan Proyek Operasi Nasional Agraria Swadaya (PRONA SWADAYA).